

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Catatan Pembuka

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui manajemen komunikasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul dalam mengurangi risiko bencana di kawasan pantai selatan. Dalam hal ini peneliti mendapatkan data hasil penelitian berupa Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul, Rencana Strategis Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul, dan Data Abrasi Pantai yang akan peneliti sajikan dalam hasil penelitian ini.

Hasil wawancara yang dilakukan merupakan wawancara langsung yang dilaksanakan oleh peneliti kepada para informan, yakni wawancara yang dilakukan terhadap pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul dan masyarakat setempat sekitar pantai.

Wawancara terhadap pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul dilakukan dengan Bp. Dewanto Dwipoyono Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPDB Bantul. Sedangkan wawancara dengan masyarakat setempat diwakili oleh Bp. Paijan dari Pantai Samas, Ibu Suminah dari Pantai Depok, dan Bp. Parto dari Pantai Kwaru.

B. Data Abrasi Pantai

Data abrasi pantai di Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa abrasi di Pantai Depok sebanyak 16 orang, abrasi di Pantai Kwaru sebanyak 78 orang, dan abrasi di Pantai Samas sebanyak 8 orang. Abrasi di Pantai Kwaru adalah jumlah abrasi terbesar yang terjadi, sedangkan abrasi di Pantai Samas merupakan abrasi yang terjadi dalam jumlah kecil.

Data abrasi pantai di Kabupaten Bantul dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4. Data Abrasi Pantai Depok

Tanggal 20 September 2013

NO	NAMA	ALAMAT	M C K	RM	WK	KR	LL	KET.
1	BAGONG	DEPOK		1				RUSAK BERAT
2	MARYOTO	DEPOK		1				SEDANG
3	SODIKAN	DEPOK		1				SEDANG
4	MARLAN	DEPOK		1				SEDANG
5	NURYADI	DEPOK		1				SEDANG
6	NASIDI	DEPOK		1				SEDANG
7	ANTO	DEPOK		1				SEDANG
8	PAK ENDAR	DEPOK		1				TERDAMPAK
9	PAK KABUL	DEPOK		1				TERDAMPAK
10	PAK GEDE	DEPOK		1				TERDAMPAK
11	CIPTOROSO	DEPOK		1				TERDAMPAK
12	MBAK ASIH	DEPOK		1				TERDAMPAK

13	MAS SUDIK	DEPOK		1				TERDAMPAK
14	MUGIYAH	DEPOK		1				TERDAMPAK
15	MTAK JIRAH	DEPOK		1				TERDAMPAK
16	SURATMIYANTO	DEPOK		1				TERDAMPAK

Sumber: BPDB Bantul, 2013.

Keterangan:

MCK : Kamar Mandi, Toilet
RM : Rumah Makan
WK : Warung Kecil (Kelontong)
KR : Kolam Renang
LL : Rumah/Fasum

Tabel 4.5. Data Abrasi Pantai Kwaru

Tanggal 21 September 2013

NO	NAMA	ALAMAT	RT	JENIS USAHA					KET.
				M C K	R M	W K	K R	L	
1	Suparman	KWARU	5	1		1	1		Hilang
2	Wiyono	KWARU	4			1	1		Hilang
3	Bambang	KWARU	4			1			Hilang
4	Ngadiman	KWARU	3			1			Hilang
5	Jumakir	KWARU	4			1			Hilang
6	Bondan	KWARU	5		1		1		Hilang
7	Mujiman	KWARU	4			1			Hilang
8	Wagiyo	KWARU	5			1			Hilang
9	Suwarno	KWARU	4		1		1		Hilang
10	Sumadi	KWARU	4	1		1			Hilang
11	Suhud	KWARU	4		1				Hilang
12	Mbah aji	KWARU	3		1		1		Hilang

13	Adi rondiyah	KWARU	6			1			Hilang
14	Erna Jelita	KWARU	4			1			Hilang
15	Darsono	KWARU	4			1			Hilang
16	Pemuda	KWARU	3			1			Hilang
17	Ismi	KWARU	6			1			Hilang
18	Purwanto/marjono	KWARU	5			1			Hilang
19	Harto Suyono	KWARU	4			1			Hilang
20	Ngadiyat	KWARU	6			1			Hilang
21	Rubiyo	KWARU	4			1			Hilang
22	Asih	KWARU	3			1			Hilang
23	Umar sahid	KWARU	1			1			Hilang
24	Sudaryani	KWARU	3			1			Hilang
25	Wiyono	KWARU	4			1			Hilang
26	Parjiyo	KWARU	5	1		1			Hilang
27	Tarjo	KWARU	4			1			Hilang
28	Sarijan	KWARU	2	1	1				Hilang
29	Marsidah	KWARU	1	1	1				Hilang
30	Anik	KWARU	4			1			Hilang
31	Linda	SAMBENG				1			Hilang
32	Dawami	KWARU	6			1			Hilang
33	Didin	KWARU	5			1			Hilang
34	Darminto	KWARU	3			1			Hilang
35	Dalhar	KWARU	4			1			Hilang
36	puspoharjono	KWARU	3			1			Hilang
37	Eksan rois	KWARU	1			1			Hilang
38	Jawari	KWARU	6			1			Hilang
39	Ali Muhsin	KWARU	2			1			Hilang

40	Zaenal	KWARU	2			1	1		Hilang
41	Bardiyo	KWARU	4			1			Hilang
42	Sukatman	KWARU	1			1			Hilang
43	Supoyo	KWARU	3	1				1	Hilang
44	Kawit	KWARU	6			1			Hilang
45	Mak Tuf	KWARU	2			1			Hilang
46	Widianto	KWARU	5			1			Hilang
47	Dalijo	KWARU	3		1				Hilang
48	Aquarium	KWARU	3					1	Hilang
49	Sunarjo	KWARU	4			1			Hilang
50	Tohari	KWARU	2		1	1			Hilang
51	Supingi	KWARU	3		1				Hilang
52	Ponijo	KWARU	3	1	1			1	Terancam
53	Pabrik es	KWARU	3					1	Terancam
54	TPI / gudang mesin	KWARU	3	1				1	Terancam
55	Umar Ahmadi	KWARU	3		1				Terancam
56	Supardi	KWARU	6			1			Hilang
57	Maryanto	KRAJAN				1			Hilang
58	Hardipranoto	KWRAU	3			1			Terancam
59	Endarti	KWARU	3			1			Terancam
60	Kaoirul	KWARU	2			1			Terancam
61	siti dalifah	KWARU	4			1			Terancam
62	Margo	KRAJAN				1			Terancam
63	Sahrowardi	KWARU	6			1			Terancam
64	Busro	KWARU	2			1			Terancam
65	Sumardi	KWARU	3			1			Terancam
66	Subardi	KWARU	1			1			Terancam

67	Agus	KWARU	6			1			Terancam
68	Komariah	KWARU	3			1			Terancam
69	Mardiyah	KWARU	2			1			Terancam
70	Warsinem	KRAJAN				1			Terancam
71	Paijo	KWARU	3			1			Terancam
72	Rukoyah	CANGKRING				1			Terancam
73	Sukarni	KWARU	3			1			Terancam
74	Tuminah	KWARU	3			1			Terancam
75	Jumini	KWARU	2			1			Terancam
76	Sum	KWARU	6			1			Terancam
77	Wilotikro	KWRAU	3			1			Terancam
78	Ny.heru	KWARU	1			1			Terancam

Sumber: BPDB Bantul, 2013.

Keterangan:

- MCK : Kamar Mandi, Toilet
RM : Rumah Makan
WK : Warung Kecil (Kelontong)
KR : Kolam Renang
LL : Rumah/Fasum

Tabel 4.6. Data Abrasi Pantai Samas

Tanggal 21 September 2013

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS USAHA					KET.
			MCK	RM	WK	KR	LL	
1	SUWONDO	Kulonprogo			1		1	HILANG
2	TRIMULYADI	Ngepet			1		1	HILANG
3	TARIMAN	Ngepet			1		1	HILANG
4	TUKIMAN				1		1	HILANG
5	BAK . PELESTARIAN	Ngepet						HILANG

	PENYU							
6	TPI.SAMAS	Ngepet						HILANG
7	RUJITO	Ngepet			1		1	HILANG
8	KASINAH	Gunung Kidul			1		1	HILANG

Sumber: BPDB Bantul, 2013.

Keterangan:

MCK : Kamar Mandi, Toilet

RM : Rumah Makan

WK : Warung Kecil (Kelontong)

KR : Kolam Renang

LL : Rumah/Fasum

C. Manajemen Komunikasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul dalam Mengurangi Risiko Bencana di Kawasan Pantai Selatan

1. Manajemen Komunikasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul

Pantai Selatan di wilayah Kab. Bantul pada dasarnya adalah pantai yang memanjang, kemudian terbagi dalam wilayah-wilayah mulai dari parangkusumo, parangtritis, samas, dan kwaru. Oleh karena tipikal dari pantai selatan yang memanjang dan kemudian terbagi dalam wilayah tertentu ini menjadikan daerah-daerah tersebut rawan terjadi abrasi.

Sebagaimana Dewanto Dwipoyono Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPDB Bantul mengungkapkan bahwa:

“Tipikal pantai selatan di bantul itu spot-spot, jadi aslinya pantai memanjang, kemudian terbagi jadi spot-spot ada parangtritis, parangkusumo, samas, dan pantai kwaru”. (wawancara, 17 Oktober 2015)

Hal tersebut dibernakan oleh Paijan salah satu warga setempat di sekitar Pantai Samas, bahwa:

“Pantai nang Gunungkidul kui mas, asline mung dowo, terus dari pirang-pirang bagian koyo parangtritis lan parangkusumo”(wawancara, 20 Oktober 2015)

(Pantai di Gunungkidul itu mas, aslinya adalah pantai yang memanjang, kemudian menjadi beberapa bagian seperti parangtritis dan parangkusumo) (wawancara, 20 Oktober 2015)

Bentuk dari pantai yang memanjang dan kemudian terbagi dalam wilayah tersebut menjadikan pantai disekitar Kab. Bantul rawan terjadi abrasi, bahkan dalam satu tahun terjadi dalam 2x periode yaitu antara juli dan desember.

Hal tersebut diungkapkan oleh Dewanto Dwipoyono bahwa; “Disini abrasi terjadi 2x periode, kalau gak salah juni, eh juli dan sampai bulan desember” (Wawancara, 17 Oktober 2015)

Menurut Wardhani (2013:350), berkaitan dengan bencana, komunikasi dapat berfungsi sebagai radar sosial yang memberi kepastian kepada pihak lain mengenai adanya bencana di suatu tempat. Komunikasi diperuntukkan pada kegiatan pra bencana yang meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi. Dalam hal ini komunikasi memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kesiapsiagaan yang diperlukan dan persiapan apa yang harus dilakukan ketika bencana itu terjadi.

Siap siaga bencana merupakan salah satu misi dari BPDB Bantul, sehingga BPDB selalu siap dan siaga untuk menghadapi bencana, bahkan saat belum terjadi bencana. Diantara tindakan yang dilakukan oleh BPDB Bantul saat sebelum terjadi bencana adalah memberi tanda batas bahaya pada tepi lautan yang tidak boleh digunakan baik untuk bangunan maupun untuk keperluan lain.

Hal tersebut telah dijelaskan oleh Dewanto Dwipoyono: “Tidak boleh mendekat ke arah yang berbahaya, biasanya 200 m dari tepi laut kita sudah beri tanda itu”. (Wawancara, 17 Oktober 2015)

Selain memberikan tanda batas bahaya BPDB Bantul juga siap siaga saat terdeteksi akan adanya bencana, dimana saat terjadi air pasang, maka BPDB Bantul langsung menuju ke lokasi pantai untuk berjaga sambil memperingatkan warga setempat.

Dewanto Dwipoyono mengungkapkan bahwa: “Kejadian air pasang Petugas ke sana langsung, di pantai, ...” (Wawancara 17 Oktober 2015)

Menurut Fuji Lestari (2011:87) komunikasi bencana adalah penanggulangan masalah bencana yang melibatkan proses komunikasi, koordinasi antara masyarakat, pemerintah, pendonor dan LSM. Pendonor dalam bencana adalah lembaga atau perusahaan yang mengeluarkan dana untuk penanggulangan bencana, sedangkan LSM adalah lembaga swadaya yang berpartisipasi dalam pelaksanaan, pengawasan penanggulangan bencana.

Hal tersebut dibenarkan oleh Dewanto Dwipoyono:

“Malam kita koordinasi dengan Dukuh dan Lurah di sana dan juga Danramil, kemudian pas hari H kita koordinasi ulang seluruh jajaran Muspika, Desa, Lurah, Dukuh, RT, dan instansi terkait terutama Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan”. (wawancara, 17 Oktober 2015)

Sebaliknya Paijan menuturkan bahwa:

“Kalau sekirane mau terjadi abrasi nggih kita lapor ke orang-orang yang biasane menangan bencana, baru terus ditangani mas, bukan mereka yang mencari warga”. (wawancara, 20 Oktober 2015)

Perbedaan pendapat yang diungkapkan oleh salah satu pegawai di BPDB Bantul dan Paijan (salah satu warga setempat) menunjukkan bahwa warga sekitar pantai tidak mengetahui proses koordinasi yang dilakukan oleh BPDB Bantul untuk menangani abrasi, sebaliknya warga setempat hanya memahami bahwa apabila terjadi tanda-tanda adanya abrasi harus melapor ke pihak terkait dan sebaliknya bukan pihak BPDB Bantul yang melakukan koordinasi. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi antara BPDB Bantul dengan warga setempat.

Saat koordinasi BPDB bersama instansi terkait serta masyarakat berkumpul dan membahas mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan pada saat bencana terjadi dan melakukan kajian analisa bencana. Hal tersebut dilakukan agar kemudian pada saat terjadi bencana sudah siap dan siaga dalam menghadapinya. Kemudian dari hasil pertemuan tersebut, kemudian

disampaikan rekomendasi ke Bupati Kab. Bantul untuk menentukan rentang waktu tanggap darurat.

Dewanto Dwipoyonomuturkan:

“Pertama kita tentukan langkah-langkah darurat, disaat bersama kita dari BPDB juga melakukan kajian analisa bencana, kita sampaikan rekomendasi ke Bupati untuk menentukan masa tanggap darurat.” (wawancara 17 Oktober 2015).

Melalui penetapan masa tanggap darurat tersebut dapat memudahkan BPDB Kab. Bantul dalam menangani bencana, karena jauh sebelum bencana terjadi sudah ada peringatan, himbauan, dan pemberitahuan tentang rentang waktu rawan terjadinya bencana, sehingga masyarakat bersama pemerintah dan instansi terkait sudah siap dan siaga dalam menghadapi bencana.

“Dengan penetapan masa tanggap darurat kita lebih flexibel, ... flexibel untuk semua sumber daya manusia”, ungkap Dewanto Dwipoyono.

Selain melakukan koordinasi, BPDB Kab. Bantul bersama instansi terkait dan masyarakat setempat bersama-sama menangani Bencana, dan membuat tenda-tenda pengungsian. Dan bagi masyarakat yang mempunyai rumah di desanya masing-masing yang tidak terkena abrasi, maka merke disuruh untuk kembali ke desanya masing-masing.

Sebagaimana Dewanto Dwipoyonomengatakan:

“Kita selalu melakukan koordinasi, ... kita membangun tenda-tenda pengungsian. Kita lakukan pugeran dan selain itu kita buat tenda pengungsian. Kemudian yang punya rumah di susunnya kita suruh kembali” (wawancara 17 Oktober 2015)

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Parto salah satu warga di sekitar Pantai

Kwaru yang menuturkan bahwa:

“Kalau masalah abrasi ya,,, ya antara masyarakat dan Tim SAR sering musyawarah mas, apalagi kalau ada tanda-tanda akan terjadi abrasi, kita lebih sering mbahas-mbahas itu” (wawancara 18 Oktober 2015)

Walaupun pada kenyataannya sedikit dari masyarakat yang ikut membantu dalam proses ini, dikarenakan mereka sudah merasa takut, lebih memilih untuk menyelematkan diri dan harta benda mereka sendiri.

“Bersama sedikit masyarakat yang mau membantu kita lakukan evakuasi di dalam rumah-rumah, ... jika memungkinkan kita juga evakuasi bangunan rumahnya.” Ungkap Dewanto Dwipoyono. (wawancara 17 Oktober 2015)

Suminah salah satu warga Pantai Depok menuturkan bahwa:

“Kalau abrasi itu kan penanganannya sudah ada petugas, lagian kalau warga ya sibuk nangani rumahnya masing-masing, jadi memang lebih banyak petugas yang bantu kita”.(wawancara 18 Oktober 2015)

Penanganan bencana dilaksanakan berdasarkan SK dari Bupati Kab. Bantul, bersama Dukuh, RT, Lurah dan instansi terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan juga Dinas Pekerjaan Umum.

“Kita melakukan operasi berdasarkan SK Bupati, ... kita suplay penuh logistik dari program bencana dan pengerahan SDM baik dari sipil maupun sosial. Dari sosial itu yang menyuplay konsumsi, Puskesmas yang memperhatikan kesehatan lingkungan, ... kemudian dari PU kalau banyak sampah yang berserakan PU yang koordinasi untuk mengelola sampahnya.” Penjelasan Dewanto Dwipoyono(wawancara 17 Oktober 2015)

Hal tersebut menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak bisa dilakukan hanya oleh BPDB Kab. Bantul, namun koordinasi dan kerjasama

yang baik antar pihak yang akan memudahkan dalam penanganan bencana. Lebih lanjut bahwa logistik yang diperoleh khususnya beras didapatkan dari BKP3.

“Kemudian di sini kita kan ada Badan Ketahanan Pangan itu BKP3, Kita mengajukan untuk menyuplai beras, karena yang punya beras mereka,... kurang lebih 40 hari selama pengungsian” ungkap Dewanto Dwipoyono (wawancara 17 Oktober 2015)

Alokasi anggaran dalam penanganan bencana abrasi tidak ada alokasi khusus, dimana dalam hal ini anggaran didapatkan dari berbagai macam instansi dan tidak hanya dari BPDB Kab. Bantul.

Hal tersebut dibenarkan oleh Dewanto Dwipoyono bahwa:

“Dana khusus yang digelontorkan khusus untuk bencana tidak ada, dari kami ada personel untuk melakukan evakuasi, ..dan sebagainya. Di Dinas Sosial kami juga ada logistik, dari kami juga ada, dari DIY ada, dari pusat ada, pakaian, sembako, ... Badan Ketahanan Pangan dia punya beras. Dari masing-masing bagian kita punya ini, sosial punya ini, kesehatan punya ini, dan sterusnya...”(wawancara 17 Oktober 2015)

Masyarakat sekitar pantai tidak mengetahui tentang dana khusus yang digunakan untuk penanganan abrasi:

Paijan menuturkan:

“Kalau dana-dana ya masyarakat nggak tau tow, yang kita tahu itu mestinya sudah ada darai Pemerintah”(wawancara 20 Oktober 2015)

Suminah menuturkan:

“Saat abrasi terjadi biaya ya dari semua pihak, bahkan kita sendiri juga butuh biaya mas, waktu harus ngungsi di daerah yang aman, sebelum dapet jatah dari Pemerintah, kita juga mendapatkan pelayanan kesehatan, jadi pada diperiksa kondisinya, sekiranya sakit ya diobati, yang banyak itu gak tau penyakit apa pokoknya deg-deg gitu, akhirnya diberi obat biar tenang”(wawancara 18 Oktober 2015)

Parto menyatakan bahwa:

“Biaya bencana persisnya saya tidak tahu, pastinya ada dari Pemerintah, yang kita tahu pas terjadi abrasi ya kita dapet jatah dari Pemerintah, kita juda dapet kesehatan dari mereka”(wawancara 19 Oktober 2015)

BPDB Kab. Bantul merupakan salah satu badan penanganan bencana yang selalu berusaha dengan optimal dalam penangan bencana, baik dari sarana dan prasarana saat digunakan, maupun sarana dan prasarana yang dirawat dengan baik.

BPDB Kab. Bantul tidak fokus menangani bencana abrasi saja, namun bencana-bencana lain seperti tsunami juga ditangani. Sehingga dalam penangan abrasi tidak ada agenda besar, karena abrasi merupakan bencana dalam skala kecil. Dampak abrasi pun juga kecil, dan yang banyak mendapatkan dampak tersebut adalah masyarakat yang tidak taat pada peringatan dan himbauan BPDB Kab. Bantul.

“Kita tidak fokus abrasi,.. tapi fokus ke tsunami, karena abrasi itu skala kecil, dan yang merasakan adlah masyarakat setempat,... masyarakat yang ngeyil (Jawa:bersikukuh)”, Ungkap Dewanto Dwipoyono (wawancara 17 Oktober 2015)

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Manajemen Komunikasi Bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul

a. Faktor Pendukung

Salah satu faktor pendukung Manajemen Komunikasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul adalah koordinasi secara langsung dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam penanganan bencana.

Sejalan dengan Fuji Lestari (2011:87) komunikasi bencana adalah penanggulangan masalah bencana yang melibatkan proses komunikasi, koordinasi antara masyarakat, pemerintah, pendonor dan LSM. Pendonor dalam bencana adalah lembaga atau perusahaan yang mengeluarkan dana untuk penanggulangan bencana, sedangkan LSM adalah lembaga swadaya yang berpartisipasi dalam pelaksanaan, pengawasan penanggulangan bencana.

Sebagaimana Dewanto Dwipoyono mengatakan:

“Kita selalu melakukan koordinasi, ... kita membangun tenda-tenda pengungsian. Kita lakukan pugeran dan selain itu kita buat tenda pengungsian. Kemudian yang punya rumah di susunnya kita suruh kembali”(wawancara 17 Oktober 2015)

Koordinasi merupakan salah satu media yang efektif digunakan dalam penanganan bencana, komunikasi bencana sangat penting dalam mengurangi risiko bencana abrasi dikawasan pantai selatan, dengan koordinasi yang baik,

maka penanganan bencana lebih mudah dilakukan dan dampak dari bencana bisa diminimalisir.

Kerjasama yang baik melalui koordinasi yang dilakukan oleh BPDB Bantul dengan warga setempat, Kepala Dukuh, Kepala Desa, Camat, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, bahkan Bupati sangat membantu dalam penanganan bencana.

Melalui Pemerintah setempat, Kepala Dukuh dapat membantu mensosialisasikan siaga bencana terhadap warga di dukuhnya, Kepala Desa membantu mensosialisasikan siaga bencana terhadap warga di Desanya, Camat membantu mensosialisasikan siaga bencana terhadap warga di lingkup kecamatan.

Melalui penetapan masa tanggap darurat tersebut dapat memudahkan BPDB Kab. Bantul dalam menangani bencana, karena jauh sebelum bencana terjadi sudah ada peringatan, himbauan, dan pemberitahuan tentang rentang waktu rawan terjadinya bencana, sehingga masyarakat bersama pemerintah dan instansi terkait sudah siap dan siaga dalam menghadapi bencana.

“Dengan penetapan masa tanggap darurat kita lebih flexibel, ... flexibel untuk semua sumber daya manusia”, ungkap Dewanto Dwipoyono (wawancara 17 Oktober 2015)

Koordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan merupakan hal yang mendukung penanganan bencana abrasi. Dinas Sosial membantu menyuplai kebutuhan pengungsi baik konsumsi, sandang dan tempat pengungsian. Dinas Kesehatan melalui Puskesmas setempat ikut

berpartisipasi dalam kesehatan pengungsi. Dinas Pekerjaan Umum berpartisipasi dalam pengelolaan sampah.

“... Dari sosial itu yang menyuplai konsumsi, Puskesmas yang memperhatikan kesehatan lingkungan, ... kemudian dari PU kalau banyak sampah yang berserakan PU yang koordinasi untuk mengelola sampahnya.” Penjelasan Dewanto Dwipoyono (wawancara 17 Oktober 2015)

Badan Ketahanan Pangan (BKP3) memberikan bantuan berupa konsumsi, khususnya dalam menyuplai beras, sebagaimana yang dituturkan oleh Dewanto Dwipoyono berikut:

“Kemudian disini kita kan ada Badan Ketahanan Pangan,, itu BKP3, ... kita mengajukan untuk menyuplai beras, karena yang punya beras mereka, kurang lebih selama 40 hari.”(wawancara 17 Oktober 2015)

Koordinasi dengan berbagai pihak merupakan faktor utama yang mendukung BPDB Bantul dalam penanganan bencana abrasi, karena penanganan bencana tidak bisa dilakukan oleh BPDB Bantul tanpa bantuan dari berbagai pihak, dan tanpa kerjasama yang baik khususnya dari warga setempat.

Kesadaran masyarakat setempat tentang bahaya abrasi merupakan hal yang sangat menentukan dalam penanganan abrasi, karena melalui kesadaran tersebut akan membantu dan memudahkan BPDB Bantul dalam penanganan bencana abrasi. Masyarakat yang taat dan patuh terhadap himbauan dan peringatan terkait bencana di sekitar pantai dapat mengurangi risiko bencana abrasi di kawasan pantai selatan.

Selain media sosial dalam koordinasi yang baik, media himbauan dan peringatan melalui papan peringatan merupakan hal yang mendukung BPDB Bantul dalam menangani bencana. Karena melalui media tersebut banyak masyarakat yang mengetahui akan bahaya bencana. Sebagaimana Dewanto Dwipoyono menuturkan bahwa “...200 m dari garis tepi pantai kita kasih peringatan..”(wawancara 17 Oktober 2015)

b. Faktor Penghambat

Salah satu faktor penghambat Manajemen Komunikasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul adalah kesadaran warga setempat dalam koordinasi. Masyarakat yang taat dan patuh terhadap himbauan dan peringatan terkait bencana di sekitar pantai dapat mengurangi risiko bencana abrasi di kawasan pantai selatan. Sebaliknya masyarakat yang tidak taat dan patuh akan menyulitkan dan bisa menambah risiko bencana abrasi di kawasan pantai selatan.

Sebagaimana Dewanto Dwipoyono mengatakan:

“Kita tidak fokus abrasi,.. tapi fokus ke tsunami, karena abrasi itu skala kecil, dan yang merasakan adalah masyarakat setempat,... masyarakat yang ngeyil (Jawa:bersikukuh)”(wawancara 17 Oktober 2015)

Masyarakat yang bersikukuh tidak mau pindah atau mengungsi sementara saat akan dan terjadinya abrasi sangat menyulitkan Petugas. Namun mereka juga mempunyai alasan tersendiri untuk tidak taat dan patuh terhadap himbauan dan peringatan bencana tersebut.

Sebagaimana Suminah menuturkan:

“Kita udah hafal masalah abrasi, kenapa harus cepet-cepet mengungsi kalau belum terjadi abrasi”(wawancara 18 Oktober 2015)

Paijan menyatakan bahwa:

“Kalau saya disuruh ngungsi yo ndak mau, kalau ngungsi nanti terjadi apa-apa dengan rumahnya bagaimana? Kalau saya tetap disini kan bisa ngawasi kalau terjadi apa-apa”.(wawancara 20 Oktober 2015)

Selain kurangnya kesadaran masyarakat pasca terjadi abrasi, penggunaan lahan yang digunakan sebagai rumah, warung tersebut merupakan penggunaan lahan secara ilegal. Tanah di sekitar pantai sesungguhnya adalah *Grown Sultan* yaitu tanah hak milik Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, kemudian pihak Keraton memberikan HGB (Hak Guna Bangunan) selama 20 tahun yang berakhir pada tahun 2010, namun sampai saat ini masih ditempati.

Sebagaimana Dewanto Dwipoyono mengungkapkan bahwa:

“Legalitas mereka, .. tidak legal sebenarnya, karena bukan tanah pribadi, tapi *Grown Sultan*, hanya diberikan HGB,... bukan Hak Milik, HGB itu hanya 20 tahun, ... itu pun berakhir tahun 2010.”(wawancara 17 Oktober 2015)

Pembangunan yang dilakukan diatas tanah yang tidak legal tersebut sangat berbahaya, selain menyalahi aturan hukum yang berlaku, bangunan-bangunan yang ada tidak memperhatikan faktor-faktor keselamatan dan bahaya terjadinya bencana.

Sebagaimana Dewanto Dwipoyono mengungkapkan bahwa:

“Seperti di pinggir sungai dibangun talut, hal seperti itu seperti melegalkan mereka. Kalau kita itu terlalu kooperatif terhadap mereka seolah kita melegalkan mereka, meleakukan pembiaran terhadap mereka.”(wawancara 17 Oktober 2015)

Tidak sedikit bangunan rumah, warung makan, kamar mandi dan bangunan-bangunan lain yang dibangun diatas tanah *Grown Sultan* tersebut menyulitkan BPDB Bantul dalam penangan bencana, bahkan pihak BPDB Bantul sengaja tidak melakukan relokasi terhadap rumah-rumah atau bangunan-bangunan yang tidak legal dan menempati lokasi bahaya tersebut.

“Kita biarkan itu bangunan pada rusak, .. tidak kita relokasi, ... karena tempatnya bahaya, .. tapi ya gitu,, setelah rusak mereka perbaiki lagi, ... bencana rusak,, mereka gunakan lagi,..” Ungkap Dewanto Dwipoyono (wawancara 17 Oktober 2015)

Pendapat tersebut sejalan dengan penuturan masyarakat setempat dalam sudut pandang yang berbeda,

Suminah mengatakan bahwa:

“Saya disini sudah sejak kecil mas, bahkan rumah ini dulu rumah Bapak, persisnya saya tidak tahu maslah surat-surat tanahnya, orang zaman dulu tidak mungkin mengurus surat-surat, ya katanya tanahe Sultan, tapi kalau memang benar tanah Sultan tidak mungkin Sultan mau gusur kita ini wong cilik”.(wawancara 18 Oktober 2015)

Paijan mengungkapkan:

“Tanah yang saya tempati ini ya legal, wong sudah dapat ijin dari Pemerintah, kita juga biasa membayar iuran-iuran warga itu, memang nasib wong cilik ya begini”(wawancara 20 Oktober 2015)

Parto mengungkapkan:

“Saya tidak punya tempat lain selain yang saya tempati ini, kalau disuruh pindah ya harus pindah kemana lagi, dan disini aman-aman saja sejak dulu, paling kena gerusan-gerusan sedikit-sedikit saja”
Dewanto Dwipoyono (wawancara 19 Oktober 2015)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa faktor utama sebagai penghambat Manajemen Komunikasi Bencana BPBD Kabupaten Bantul adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya abrasi, disamping terdapat faktor lain seperti bangunan yang menempati lokasi bahaya, koordinasi yang kurang baik, dan bangunan yang tidak kokoh.

D. Catatan Penutup

Hasil penelitian berupa Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul, Rencana Strategis Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul, dan Data Abrasi Pantai merupakan data-data yang mendukung penelitian ini.

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul merupakan suatu laporan yang memberikan informasi tentang tingkat keberhasilan yang dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program – program yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari hasil LAKIP menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan yang dicapai BPBD Kab. Bantul 95% yang berarti sangat berhasil.

Rencana Strategis Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul memberikan gambaran tentang sebuah perencanaan jangka menengah yang sangat dibutuhkan oleh sebuah lembaga. Perencanaan strategis dijadikan acuan bagi kebijakan dan tindakan yang akan dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dalam penanggulangan bencana (sebelum, saat, dan setelah kejadian).

Data Abrasi Pantai menunjukkan bahwa abrasi pantai merupakan sebuah bencana yang tidak dapat dihindarkan, sehingga melalui data tersebut dapat diketahui tentang rencana, program, dan kegiatan yang diperlukan yang harus dilakukan untuk mengurangi dampak dari abrasi pantai. Data abrasi pantai di Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa abrasi di Pantai Depok sebanyak 16 orang, abrasi di Pantai Kwaru sebanyak 78 orang, dan abrasi di Pantai Samas sebanyak 8 orang. Abrasi di Pantai Kwaru adalah jumlah abrasi terbesar yang terjadi, sedangkan abrasi di Pantai Samas merupakan abrasi yang terjadi dalam jumlah kecil.

Faktor pendukung Manajemen Komunikasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul adalah media komunikasi yang digunakan, yaitu media sosial, koordinasi yang baik dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait, kesadaran masyarakat tentang bahaya bencana, dan anggaran bencana yang datang dari berbagai pihak.

Faktor utama sebagai penghambat Manajemen Komunikasi Bencana BPBD Kabupaten Bantul adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya

abrasi, disamping terdapat faktor lain seperti bangunan yang menempati lokasi bahaya, koordinasi yang kurang baik, dan bangunan yang tidak kokoh.